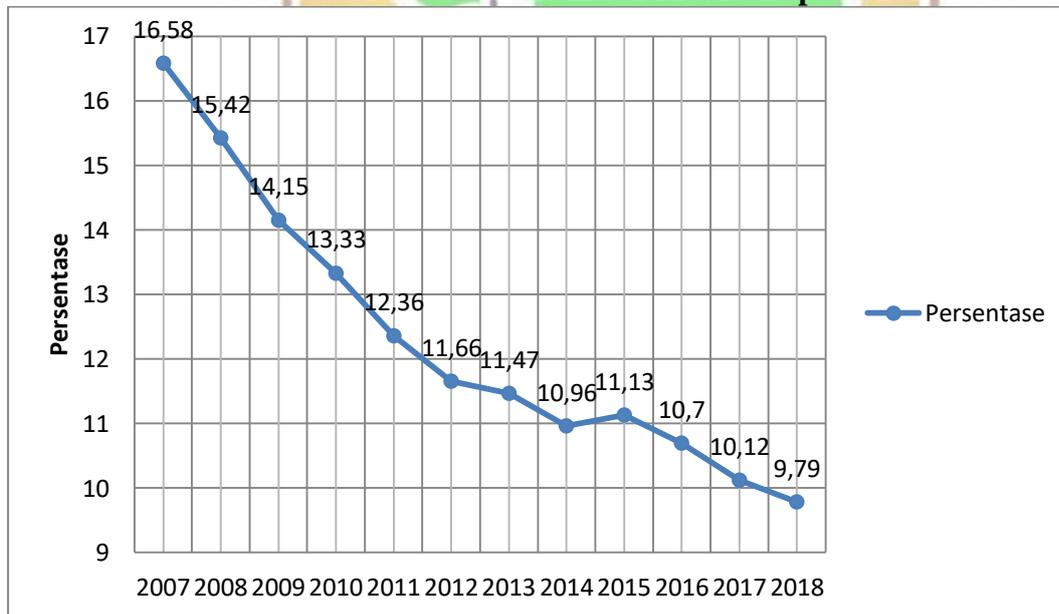


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia masih menjadi negara yang memiliki angka tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Telah banyak berbagai macam program dilaksanakan oleh pemerintah demi mengurangi angka tingkat kemiskinan, salah satunya program bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada kelompok masyarakat miskin. Namun program tersebut masih belum ampuh untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Pada bulan Maret tahun 2018 tercatat persentase kemiskinan di Indonesia sebesar 9,79% atau sebanyak 25,95 juta penduduk masih dikategorikan sebagai penduduk miskin. Bersumber pada data Badan Pusat Statistik (BPS) angka tingkat kemiskinan di Indonesia secara umum mengalami penurunan.

Gambar 1.1
Persentase Penduduk Miskin di Indonesia pada Tahun 2007-2018

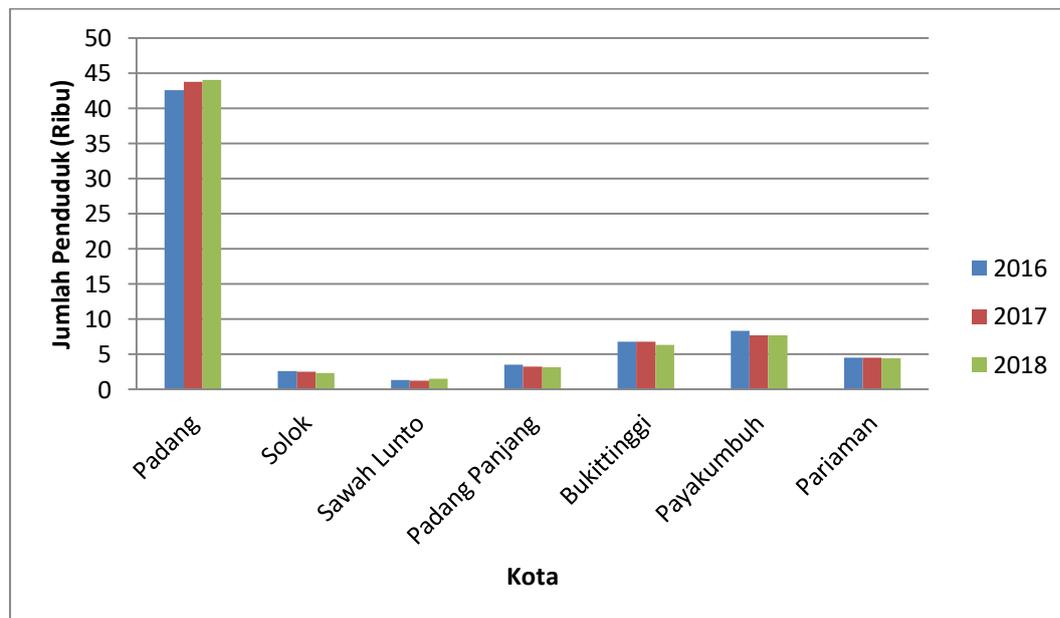


Sumber: BPS 2019 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat angka persentase kemiskinan di Indonesia pada tahun 2007 sebesar 16,58%. Dalam tiga tahun berikutnya kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, hal ini dibuktikan pada tahun 2010 tercatat persentase kemiskinan di Indonesia turun menjadi 13,33%. Dalam empat tahun berikutnya kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang drastis hal itu dibuktikan pada tahun 2014 tercatat persentase kemiskinan di Indonesia turun menjadi 10,96%. Namun pada tahun berikutnya persentase kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan yakni sebesar 0,17%, tercatat pada tahun 2015 tersebut persentase kemiskinan di Indonesia sebesar 11,13%. Sedangkan di tahun 2018 angka persentase kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan menjadi 9,79% dengan jumlah taraf kemiskinan di Indonesia tahun 2018 sebesar 125,58 ribu.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kemiskinan merupakan permasalahan serius yang harus ditangani oleh pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah banyak menggalakkan program pengentasan kemiskinan, namun hal tersebut belum terbukti mampu untuk mengentaskan taraf kemiskinan di Indonesia. Terlihat dari taraf kemiskinan di beberapa provinsi di Indonesia yang masih tinggi, salah satunya taraf kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Bersumber pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008 hingga 2018 terlihat total penduduk miskin di Sumatera Barat selalu mengalami naik-turun. Total penduduk miskin pada awalnya di Sumatera Barat sebesar 426,1 ribu jiwa dan mengalami kenaikan sebesar 32,1 ribu jiwa menjadi 458,2 ribu jiwa. Dari data yang diperoleh didapatkan bahwa Kota Padang termasuk kota yang memiliki taraf kemiskinan yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan kota lainnya yang relatif mengalami penurunan. Hal ini terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2 Perbandingan Total Penduduk Miskin di Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2018



Sumber: BPS 2019 (diolah)

Bersumber pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016-2018, Kota Padang pada tahun 2018 total penduduk miskinnya sebesar 44,04 ribu jiwa. Hal ini memperlihatkan kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 290 jiwa. Tingkat indeks gini Kota Padang yaitu sebesar 0,344, indeks ini lebih besar jika dibandingkan dengan kota lain. Sementara itu bersumber pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2018 angka garis kemiskinan di Kota Padang yaitu Rp. 507.557 yang naik sebesar 6,77% dari tahun sebelumnya, taraf garis kemiskinan di Kota Padang ini merupakan yang tertinggi di Provinsi Sumatera Barat.

Bersumber pada permasalahan di atas, maka diperlukan strategi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Kota Padang. Strategi ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan kemiskinan sehingga dapat mencapai tingkat kesejahteraan. Kesejahteraan adalah mimpi bagi semua manusia dalam kehidupannya. Kesejahteraan diartikan dengan suatu kondisi seluruh kebutuhan manusia terpenuhi. Standard terpenuhi kebutuhannya

manusia yang paling mendasar itu seperti makan, minum, pakaian, dan hingga pengakuan adanya mereka dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, ada beberapa hal yang wajib dilakukan serta adanya pengorbanan yang harus dilewati demi untuk mencapai kesejahteraan yang didambakan setiap manusia, seperti dengan bekerja. William Glasser mengungkapkan (Sumarnonugroho, 1984) bahwa demi terpenuhinya kebutuhan tersebut individu harus bekerja dan saat bekerja individu akan melalui proses belajar bagi dirinya, karena individu sedikit banyaknya akan memperoleh keahlian, ilmu, dan keterampilan. Namun kenyataannya dilapangan sangat berbeda, masih banyak individu yang sudah bekerja namun masih belum dapat meningkatkan perekonomian keluarga, sehingga masih belum bisa mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan.

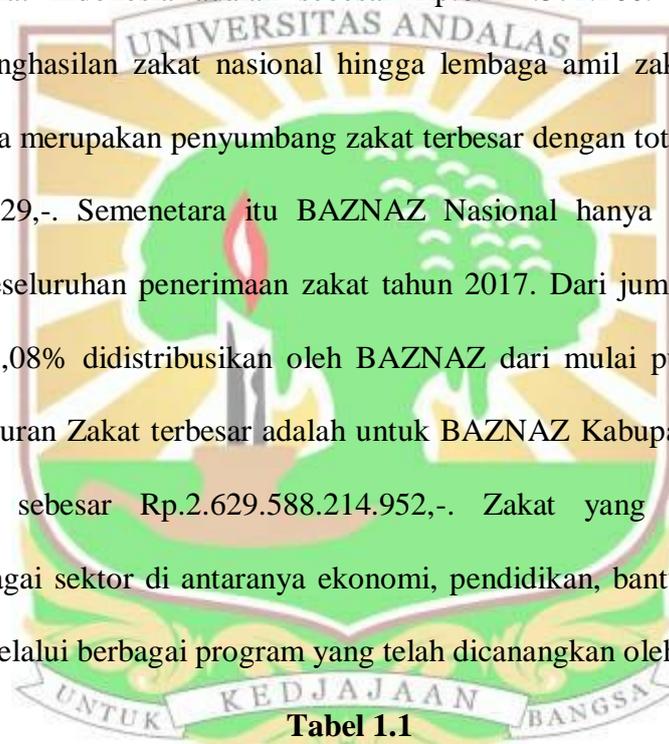
Dalam Islam zakat adalah salah satu cara demi memberantas kemiskinan, berbagai studi telah dilakukan dan terbukti bahwa zakat dapat meminimalisir tingkat kemiskinan, dan diharapkan dapat membantu untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Pada zaman Rasulullah, zakat dikenal dengan nama baitul maal, pada masa Rasulullah setiap yang mampu mewajibkan untuk menyerahkan sebagian hartanya kepada baitul maal.

Zakat menjadi salah satu kewajiban umat Islam yang mesti ditunaikan, hal itu tercantum dalam rukun Islam yang ke-3. Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya menjadikan zakat sebagai modal untuk mengatasi kemiskinan di masa pemerintahannya. Jika rencana zakat diterapkan dengan baik secara nasional maupun multisional, maka persoalan kemiskinan didunia Islam akan bisa teratasi dengan segera. Maka dari itu zakat merupakan modal besar untuk pembangunan negara. (Mujahidin, 2007: 6).

Agar zakat ditangan mustahik (orang yang berhak mendapatkan bantuan zakat) tidak dipakai hanya untuk kebutuhan konsumtif, maka zakat bisa dipakai sebagai kebutuhan produktif yang disebut dengan zakat produktif. Fungsi dari zakat produktif ini lebih

mengarah ke bentuk dan pola pendayagunaan zakat agar menjadi produktif ditangan mustahik. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa zakat produktif merupakan bantuan dana modal yang diberikan oleh BAZNAS kemudian dikelola oleh *mustahik* dengan cara produktif yaitu mengembangkan uang tersebut agar dapat mencukupi kebutuhan dasar hidup dimasa yang akan datang (Asnainu, 2008).

Indonesia merupakan negara penduduk Islam terbesar di dunia. Maka dari itu total potensi zakat akan besar. Berdasarkan data Indonesia zakat outlook tahun 2019, ditemukan bahwa potensi zakat Indonesia adalah sebesar Rp.6.224.371.260.471,- Jumlah tersebut didapatkan dari penghasilan zakat nasional hingga lembaga amil zakat (LAZ). BAZNAZ Kabupaten atau kota merupakan penyumbang zakat terbesar dengan total penerimaan sebesar Rp.3.426.689.437.629,-. Sementara itu BAZNAZ Nasional hanya berkontribusi sebesar 2,47% dari total keseluruhan penerimaan zakat tahun 2017. Dari jumlah penghasilan zakat tersebut sebesar 78,08% didistribusikan oleh BAZNAZ dari mulai pusat hingga Lembaga Amil Zakat. Penyaluran Zakat terbesar adalah untuk BAZNAZ Kabupaten/kota dengan total penyaluran Zakat sebesar Rp.2.629.588.214.952,-. Zakat yang didistribusikan akan disalurkan ke berbagai sektor di antaranya ekonomi, pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, dan lain-lainnya. Melalui berbagai program yang telah dicanangkan oleh BAZNAZ.



Tabel 1.1

Persebaran penghasilan dan penyaluran Zakat Nasional tahun 2018

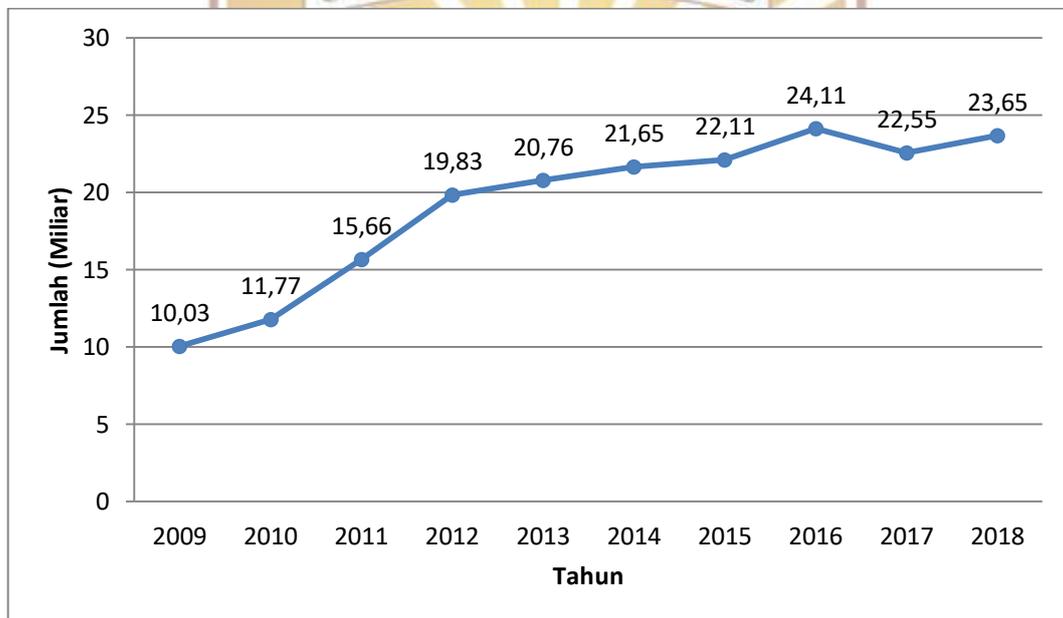
No	Sektor	Penghasilan	%	Penyaluran Zakat	%
1	BAZNAZ	153.542.103.405	2,47	131.917.747.764	2,71
2	BAZNAZ Provinsi	448.171.189.258	7,2	338.168.225.347	7,99
3	BAZNAS Kabupaten/kota	3.426.689.437.619	55,05	2.629.588.214.952	54,1
4	LAZ	2.195.968.539.189	35,28	1.710.481.136.382	35,2
TOTAL		6.224.371.260.471	100	4.860.155.324.445	100

Sumber: BAZNAS 2019 (diolah)

Bersumber pada data Baznas di atas dapat disimpulkan bahwa zakat menjadi salah satu potensi dan peluang terbesar bagi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan

adanya Lembaga Zakat yang berdiri mulai dari pusat hingga daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. BAZNAS Kota Padang menjadi salah satu cabang dari BAZNAS Pusat untuk wilayah Sumatera Barat, yang merupakan lembaga nirlaba yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah serta wakaf (ZISWAF).

Gambar 1.3
Penerimaan Zakat BAZNAS Kota Padang tahun 2009-2018



Sumber: BAZNAS Kota Padang (diolah)

Bersumber pada gambar di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir tingkat penerimaan zakat BAZNAS Kota Padang selalu mengalami peningkatan. Penerimaan zakat BAZNAS Kota Padang terbesar terjadi pada tahun 2016 dengan total penerimaan Rp. 24.116.168.208. Namun pada tahun berikutnya BAZNAS Kota Padang mengalami penurunan penerimaan zakat sebesar 6,47% yaitu sekitar 1,56 miliar namun pada tahun 2018 BAZNAS Kota Padang kembali mengalami peningkatan sebesar 4,88% yaitu sekitar 1,1 miliar.

Selama ini zakat yang digunakan sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan didasarkan hanya pada satu aspek saja, yaitu aspek materiil. Sekarang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan alat pengetasan kemiskinan tidak didasarkan pada aspek materiil saja, ada penambahan satu aspek lagi yaitu aspek spiritual. Model yang dapat menghitung instrumen kemiskinan yang menggunakan aspek materiil dan spiritual adalah *Central for Islamic Business and Economic Studies (CIBEST) Model*. *CIBEST Model* ialah model yang masih dikembangkan oleh Beik dan Arsyianti (2015). Model ini mengembangkan konsep kuadran yang dikelompokkan ke dalam empat area yaitu, sejahtera (kuadran 1), miskin spiritual (kuadran 2), miskin materiil (kuadran 3), dan miskin absolut (kuadran 4). Kelebihan dari model *CIBEST* yaitu bisa menghitung kemiskinan yang dinilai dari dua aspek, yang pertama aspek materiil dan yang kedua aspek spiritual, dan dua komponen utama yang kita lihat ialah tipologi kemiskinan dan indeks.

Hal yang paling penting selanjutnya yaitu bagaimana cara menetapkan standar kebutuhan minimal materiil dan spiritual tersebut. Kebutuhan materiil yang dianalisis ialah kebutuhan pokok yang mencakup kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan juga ditambahkan kebutuhan akan transportasi dan komunikasi yang saat ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Sedangkan kebutuhan spiritual didasarkan pada analisis memenuhi kewajiban agama dan menjalin hubungan penuh dengan rasa kepercayaan terhadap Tuhan (Achir Yani S Hamid, 2000).

Maka dari itu berdasarkan masalah tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK KOTA PADANG MENGGUNAKAN MODEL *CIBEST* (STUDI KASUS: BAZNAS KOTA PADANG)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perubahan pendapatan *mustahik* sesudah dan sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif?
2. Bagaimana penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan taraf kesejahteraan *mustahik* Kota Padang berdasarkan model *CIBEST*?

1.3. Tujuan Umum Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis perubahan pendapatan *mustahik* sesudah dan sebelum mendapatkan bantuan dana zakat.
2. Menganalisis penyaluran dana zakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan *mustahik* Kota Padang berdasarkan model *Cibest*.

